

Dampak Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Dalam Peningkatan Kualitas Hidup Penerima Manfaat Di Kabupaten Banyumas

IMPLEMENTATION OF E-GOVERNMENT ON THE E-ORDER SYSTEM TO INCREASE MICRO, SMALL, AND MEDIUM ENTERPRISES IN SOUTH JAKARTA

Chamid Sutikno ¹, Suryoto ², Luluk Fadhilah ³

¹ Prodi Administrasi Publik, Universitas Nahdlatul Ulama, Purwokerto

² Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Universitas Wijayakusuma, Purwokerto

³ Magister Ilmu Administrasi, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto

E-mail: suryoto@unwiku.ac.id

Abstrak: Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni merupakan program bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Program MBR merupakan masyarakat miskin yang tidak mempunyai kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari. Diperlukan adanya kepedulian dalam menyelesaikan permasalahan ini dan diperlukan keterlibatan seluruh unsur masyarakat mulai dari pemerintah tingkat pusat, pemerintah tingkat daerah, sektor usaha, masyarakat dan pihak yang lain.. Kualitas rumah sebagai tempat tinggal penerima manfaat juga perlu diperhatikan untuk mendukung kelangsungan hidup MBR. Dengan hal tersebut, dibutuhkan kesediaan proses evaluasi dari akibat yang terjadi, apakah sudah sesuai atau belum. Tujuan penelitian adalah untuk mengidentifikasi terkait dengan akibat ataupun dampak dari rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni dalam meningkatkan taraf kehidupan yang lebih baik bagi penerima manfaat di Kabupaten Banyumas. Metode pengambilan sampel dengan metode gugus bertahap/ cluster sampling dengan penentuan jumlah sampelnya menggunakan rumus Slovin dengan tingkat kesalahan 10 %. Teknik analisis data menggunakan Statistik Deskriptif dan Mann Whitney U- Test. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa tingkat kualitas hidup penerima manfaat dilihat dari aspek kesejahteraan fungsional. Dari hasil uji beda Mann Whitney U-Test, diketahui bahwa terdapat perbedaan yang signifikan peningkatan kualitas hidup antara kelompok sasaran dan kelompok kontrol. Dapat disimpulkan bahwa Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni memberikan dampak positif dalam meningkatkan taraf kehidupan masyarakat yang lebih baik khususnya bagi penerima manfaat di Kabupaten Banyumas.

Kata Kunci: *Bantuan Rumah Tidak Layak Huni, Evaluasi Dampak, Kesejahteraan Fungsional*

Abstract: *The rehabilitation program for uninhabitable houses is a social assistance program provided to low-income communities (MBR). The MBR program is a poor community that is unable to meet its basic daily needs. There is a need for concern in solving this problem and the involvement of all elements of society starting from the central government, regional government, the business sector, the community, and other parties needed. The quality of the house as the residence of the beneficiaries needed to be considered to support the survival of MBR. With this, it tests a willingness to evaluate the consequences that occur, whether it is appropriate or not. The purpose of the study was to identify the consequences or impacts of social rehabilitation of uninhabitable houses in improving a better standard of living for beneficiaries in Banyumas District. The sampling method is gradual cluster sampling with the determination of the number of samples using the solving formula with an error rate of 10%. Data analysis techniques using descriptive statistics and Mann-Whitney U-Test. Based on the results of the research that has been shown that the level of quality of life for the beneficiaries is seen from the aspect of functional welfare. From the results of the different Mann Whitney U-Test, it is known that there is a significant difference in improving the quality of life between the target group and the control group. It will be concluded that the social rehabilitation program for uninhabitable houses has a positive impact on improving a better standard of living, especially for the beneficiaries of Banyumas District.*

Keywords: *Assistance for Uninhabitable Housing, Impact Evaluation, Functional Welfare*

PENDAHULUAN

Kemiskinan menjadi masalah sosial yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan perkembangan di berbagai negara (Musa, 2016:5). Kemiskinan dapat dipahami sebagai kondisi dimana kurangnya sumber daya atau pendapatan yang tidak mencukupi. Dalam bentuknya yang paling ekstrem, kemiskinan adalah kurangnya kebutuhan dasar manusia untuk mempertahankan efisiensi dan efisiensi kerja seperti makanan, sandang, perumahan, air bersih dan kesehatan yang memadai dan bergizi (Korankye, 2014:8). Kemiskinan dapat terjadi diakibatkan dari penghasilan tidak menentu, minimnya kesempatan untuk bekerja, tidak memiliki keterampilan, tidak memiliki akses terhadap pengetahuan, pendidikan dan pengembangan diri secara relevan yang memberikan harapan dalam kehidupan mereka. (Wilson and Brend De Mast, 2013:10). Kemiskinan juga dapat disebabkan oleh sejumlah faktor termasuk korupsi dan tata kelola yang buruk, kesempatan kerja yang terbatas, infrastruktur yang buruk, penggunaan sumber daya yang buruk, peperangan dan konflik tanpa akhir, kebijakan Bank Dunia dan IMF yang buruk, pengaruh kebudayaan dan strukturalnya. Keberadaan orang yang tidak mampu cenderung tidak mempunyai kekuatan dan tidak bisa berpengaruh besar terhadap proses kepentingan umum, kebijakan publik, dan distribusi bantuan (Korankye, 2014:147).

Kondisi kemiskinan yang terjadi dimasyarakat memberikan gambaran persepektif dari masyarakat untuk tidak bisa mencukupi kebutuhan dasarnya (Paraskevi, 013:10). Kebutuhan dasar tersebut diantaranya pendidikan, sandang, pangan, tempat tinggal, pekerjaan, air bersih, sumber daya alam, kesehatan, keamanan, kenyamanan lingkungan dalam menjalankan kehidupan sosial. (Etzioni, 2010 : 1). Pendapat bahwa hak dasar yang harus dipenuhi manusia adalah kesehatan, perumahan dan menjadi skala prioritas dalam pembangunan nasional suatu negara (Osmod and Ikoku 2015:3). Kemiskinan

merupakan salah satu permasalahan hidup yang dapat dijadikan sebagai tolak ukur untuk mengetahui bagaimana kondisi dan situasi kesejahteraan masyarakat dalam ruang lingkup rumah tangga secara kecil (Benjamin, 2018:8). Kesejahteraan sosial mempengaruhi kemampuan rumah tangga tertentu untuk mengakses pendapatan, kekayaan, pekerjaan dan perumahan (Jing and Yin, 2017 :20). Masalah tersebut bukan sekedar masalah biasa yang terjadi, namun perlu adanya upaya penyelesaian ataupun pemberantas yang direncanakan dan mengimplementasikan secara kompleks dengan melibatkan berbagai unsur kehidupan dimasyarakat. Kemiskinan dapat juga dijelaskan bahwa ketidakmampuan individu ataupun keluarga tidak dapat mencukupi kebutuhan-kebutuhan hidup dasar dalam menjalani roda kehidupan di lingkungan sosial. (Normaliza and Ibrahim, 2017:12). Kemiskinan atau kekurangan material dapat menimbulkan berbagai pengaruh terhadap komponen kehidupan sosial dan standar hidup (Liou, 2017 :1). Artinya, sangat diperlukan komitmen pemerintah untuk menemukan alternatif dalam upaya mengurangi kemiskinan yang selama ini di alami oleh masyarakat Naderi and (Azam. 2018:4).

Dalam upaya menurunkan tingkat kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Banyumas ialah mengimplementasikan program rehab rumah yang tidak layak untuk ditempati oleh masyarakat. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan penataan ruang dan bidang pertanahan yang merupakan kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah. Sebelum tahun 2020 program bantuan RTLH juga sudah dilaksanakan, namun dulu Organisasi Perangkat Daerah yang

menangani adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyumas. Setelah adanya Perda Nomor 16 Tahun 2016 Program RTLH masuk dalam tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Model pembiayaan dalam Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yaitu dengan mendistribusikan bantuan secara langsung kepada masyarakat sebagai penerima manfaat bantuan sosial. Dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas dalam program Kegiatan Penanganan Rumah Tidak Layak Huni masuk ke dalam Belanja Tidak Langsung (BTL) dan keberadaan anggaran dipegang secara penuh oleh di Badan Keuangan Daerah (BKD) sedangkan tugas Dinas Perumahan kemudian tugas terkait dengan pendataan dan verifikasi yang telah ditentukan terhadap masyarakat yang menjadi calon penerima bantuan ditanggungjawab oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Implementasi program di masyarakat secara langsung, Pemerintah Kabupaten Banyumas memverifikasi data yang telah disurvei terlebih dahulu sebelum mendistribusikan penyerahan bantuan kepada masyarakat. Provinsi Jawa Tengah memiliki target masyarakat yang menjadi sasaran RTLH yang berdasar pada data dari PPLS tahun 2013 sebanyak 1.723.500 unit sedangkan data dari PBDT tahun 2015 sejumlah 1.682.723 unit. Sasaran jumlah RTLH di Kabupaten Banyumas sendiri berdasarkan data dari PBDT tahun 2020 mencapai jumlah 116.977 dengan rincian sebanyak 10.080 masuk pada prioritas ke 1, sebanyak 48.514 masuk pada prioritas ke 2, dan sebanyak 58.383 masuk pada prioritas ke 3. Penanganan RTLH dilaksanakan dengan mensinergikan program dari Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota. Pembagian peran dan tanggung jawab terhadap penyelesaian masalah tersebut dalam periode tahunan diusahakan dengan memperoleh perbandingan dari pemerintah tingkat pusat sampai tingkat daerah yaitu 20% untuk Pemerintah Pusat, 30% Pemerintah Provinsi

dan 50% Pemerintah Kabupaten Kota. penyerahan Bansos pada program RTLH Tahun 2020 yang diimplementasikan secara menyeluruh dan secara bertahap. Sebelum tahun 2020 bantuan RTLH yang bersumber dari APBD Kabupaten Banyumas mendapatkan bantuan Rp.4.000.000,- / rumah dan rencana untuk tahun 2017 mendapat bantuan Rp.7.000.000,-/ rumah. Bantuan yang bersumber dari APBD Provinsi tahun 2016 dengan alokasi dana Rp.10.000.000,-/ rumah, Stakeholder lain seperti Badan Kerjasama Antar Desa masing – masing Kecamatan memberikan bantuan RTLH dengan alokasi 1 desa 1 rumah dengan dana Rp.4.500.000,-/ rumah.

Pada tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Banyumas telah memberikan bantuan untuk pemugaran Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sebesar 1500 rumah. Sampai dengan tahun 2020 ada beberapa RTLH di Kabupaten Banyumas yang telah dipugar dari berbagi sumber anggaran.

Tabel 5. Data Realisasi dan Target RTLH di Kabupaten Banyumas

No	Program Kegiatan	Realisasi Tahun 2019 (jumlah akumulasi)	Sasaran Tahun 2020
1.	Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Kementrian PUPR	1026	302
2.	Bantuan RTLH APBD Provinsi Jawa Tengah	240	764
3.	Bantuan RTLH APBD Kabupaten Banyumas	3129	720
Jumlah Total		4395	1786

Sumber : Dinperkim Kabupaten Banyumas Tahun 2019 - 2020

Berdasarkan tabel Data Realisasi dan Target RTLH di Kabupaten Banyumas, sampai dengan Tahun 2020 jumlah rumah yang mendapatkan Bantuan Stimulan dari Kementerian PUPR sebanyak 1026 rumah, Bantuan dari APBD Provinsi Jawa Tengah sebanyak 240 rumah, dan Bantuan dari APBD Kabupaten Banyumas sebanyak 3129 rumah. Sedangkan untuk Sasaran RTLH Tahun 2017 yang akan mendapatkan bantuan dari Kementerian PUPR sebanyak 302 rumah, bantuan dari APBD Provinsi Jawa Tengah sebanyak 764 rumah, dan bantuan dari APBD Kabupaten Banyumas sebanyak 720 rumah. Sampai dengan bulan Oktober 2017, bantuan RTLH dari APBD Kabupaten Banyumas belum terealisasi.

Berkaitan dengan kebijakan bahwa kebijakan sosial merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup manusia melalui pemberian beragam program. Kebijakan yang dikembangkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam bentuk Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat RTLH merupakan kebijakan yang relevan dengan amanat Undang-undang dalam rangka menciptakan swadaya masyarakat yang tinggi untuk mendirikan tempat tinggal yang layak yang pada lingkungan yang terjamin kesehatannya, keamanannya dan membangun hubungan yang harmonis dalam kehidupan. Dengan hal itu, maka dibutuhkan pemberdayaan sumberdaya masyarakat dan meningkatkan kontribusi dari pemerintah daerah. Dengan memberikan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya yang merupakan bantuan pemerintah yang diperuntukan oleh masyarakat dengan kriteria pendapatan yang belum cukup sebagai stimulant untuk dapat mendirikan bangunan rumah dengan dilengkapi sarana prasarana dan utilitas umum yang memadai dan berkualitas berupa stimulan bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk meningkatkan keswadayaan dalam pembangunan/ peningkatan kualitas rumah beserta sarana, prasarana dan utilitas umum. Maksud dan tujuan Bantuan Stimulan

Perumahan Swadaya menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2016 adalah :

1. Meningkatkan prakarsa Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) untuk mendirikan bangunan serta meningkatkan tempat tinggal yang lebih baik dengan dilengkapi seperti prasarana, sarana dan utilitas.
2. Terwujudnya tempat tinggal yang layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dengan dilengkapi berbsgsi prasarana, sarana, dan utilitas umum sehingga mampu memberikan manfaat bagi tempat tinggal masyarakat yang terjamin kesehatannya, keamanannya, keserasiannya dan teratur serta berkelanjutan.

Dampak yang diharapkan dari Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) ialah meningkatnya kesejahteraan umum Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) setelah menerima bantuan yang dapat dilihat dari beberapa aspek kesejahteraan. Kondisi yang diharapkan adalah tingkat kesejahteraan penerima program meningkat setelah menerima bantuan. Dampak kebijakan BSPS atau RTLH dapat diukur dari keadaan fisik atau kondisi lingkungan yang disebabkan dari adanya hasil kebijakan yang ditetapkan. Dalam hal ini output kebijakannya adalah berdirinya bangunan tempat tinggal layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan lengkapi seperti sarana, prasarana dan utilitas umum sehingga mampu memberikan manfaat bagi tempat tinggal masyarakat yang terjamin kesehatannya, keamanannya, keserasiannya dan teratur serta berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah Penelitian *Summative* yaitu mengukur dampak Kkebijakan maka design penelitian yang digunakan adalah *Comparative After Only* yaitu membandingkan Dampak Program terhadap Kelompok Sasaran dan Kelompok Kontrol (Creswell, R. 2014, Declan.2018).

Dalam penentuan jumlah sample dari populasi rumus yang sering digunakan dalam penelitian (Yanfika *et al*, 2018:1) adalah rumus slovin. Rumus Slovin digunakan untuk menghitung ukuran sampel (Kalimba *et al*, 2018:523). Dalam pengambilan sampel penelitian ini menggunakan metode *cluster sampling*. Metode ini digunakan karena itu metode ini lebih efektif dan optimal (Jaelani & Danish, 2018:2). Dalam penelitian ini akan menggunakan Skala Pengukuran Likert yaitu dengan cara yang lebih sistematis untuk memberikan skor pada indeks, yang menunjukkan tingkat gradasi dari sangat positif sampai negatif (Munshi, 2014: 1, Joshi *et al*, 2015:396). Item Likert adalah pertanyaan ordinal pilihan paksa yang menangkap intensitas opini atau tingkat penilaian dalam responden survei. Secara historis item Likert terdiri dari lima poin kata, kata yang digunakan tergantung pada kebutuhan (Derrick and White, 2017:1).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Evaluasi Kebijakan

Berdasarkan beberapa uraian permasalahan tentang penyaluran Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Banyumas maka perlu dilakukan adanya evaluasi program kebijakan tersebut. Evaluasi adalah suatu proses mekanisme dalam kebijakan publik yang digunakan untuk menganalisis suatu kebijakan yang telah diimplementasikan (Marmaya & Mahbub, 2018:5). Dengan hal tersebut, maka dapat menentukan patokan dan golongan yang dijadikan sebagai landasan dasar dalam menilai suatu kebijakan dapat mencapai suatu harapan (Kwong, 2015:20). Evaluasi kebijakan juga bisa dijelaskan sebagai salah satu bentuk aktivitas yang menitikberatkan pada pencapaian nilai melingkupi seperti beragam kepentingan, pelaksanaan dan akibat (Rafiu A 2017:4). Dengan demikian, evaluasi dapat dipersepektifkan sebagai salah satu bentuk aktivitas yang sangat penting dalam capaian suatu nilai implementasi, sehingga evaluasi kebijakan

tidak terhenti samapai dengan proses akhir, namun dapat diimplementasikan dari seluruh proses kebijakan yang ada. Dengan hal tersebut, evaluasi kebijakan dapat melingkupi dari pelaksanaan mulai dari proses tahap perumusan masalah, program rekomendasi yang dapat memecahkan permasalahan publik, pelaksanaan, ataupun tahap akibat dari *output* kebijakan. (Molina et,al.2013:10).

Kebijakan publik yang dikeluarkan harus sesuai dan memenuhi rasa keadilan masyarakat dan mengandung nilai – transparansi, dan evaluasi kebijakan harus terus menerus dilaksanakan supaya kedepannya program atau kebijakan yang dilaksanakan dapat tepat sasaran dan fungsi (Urooj & Parven.2017:5). Evaluasi dampak terfokus pada apa yang telah benar- benar dicapai oleh kebijakan dan berusaha mengukur serta menilai apakah tujuan kebijakan telah dicapai. Analisis dampak kebijakan menggunakan jenis evaluasi yang khas, yaitu evaluasi kuantitatif (Roberts, 2017:13). Evaluasi dampak mencakup banyak jenis penilaian, termasuk evaluasi tingkat kebijakan, penilaian bersamaan, studi pelacak, penilaian cepat dan penilaian penerima manfaat, pemantauan indikator, dan bahkan survei pelacakan pengeluaran publik dalam konteks pengelolaan sektor publik (Abonor & Joy AE. 2017:10). Masing-masing dapat memiliki peran penting dalam sistem pemantauan dan evaluasi. Tapi evaluasi dampak memiliki makna dan tujuan khusus. Seiring waktu, evaluasi dampak telah berevolusi menjadi serangkaian analisis terkait yang cukup seragam. Evaluasi dampak dapat memberikan informasi unik tentang keefektifan dan nilai program social (Michael and Emmanuel 2015:6).

Evaluasi kebijakan adalah penentuan strategi atau langkah yang dapat diambil dan digunakan untuk masa mendatang yang berdasarkan pada penilaian suatu tahapan-tahapan dalam proses kebijakan publik seperti tahap pelaksanaan, capaian sementara dan pengaruh dari adanya kebijakan yang berjalan. (Nwagboso, 2012 :2). Adapun metode yang dilakukan dalam

proses evaluasi kebijakan dalam mengidentifikasi secara kompleks dan efektif terkait dengan urusan proses kebijakan, proses pelaksanaan, menilai suatu hal yang dalam hal ini ialah perbedaan antara kondisi masyarakat di berbagai bidang dengan actor kepentingan yang terlibat (Bredenoord & J. Archit Eng. 2016:4). Proses evaluasi dapat dijadikan sebagai proses akhir dalam penyusunan kebijakan yang dipengaruhi adanya berbagai masalah sehingga sering terjadi ketidaksanggupan dari pemerintah dalam menyelesaikan urusan publik (Leung, et al. 2015:6). Proses evaluasi seringkali mencakup pada masyarakat dan sistemnya (Thomas, 2017:3). Sering kali evaluasi mengalami kegagalan dalam mewujudkan capaian yang diharapkan. (Stan and Arthur, 2013:2)

Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)

Kebijakan yang dikembangkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam bentuk Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat RTLH merupakan kebijakan yang relevan dengan amanat Undang-undang dalam rangka menciptakan swadaya masyarakat yang tinggi untuk mendirikan tempat tinggal yang layak yang pada lingkungan yang terjamin kesehatannya, keamanannya dan membangun hubungan yang harmonis dalam kehidupan. Dengan hal itu, maka dibutuhkan pemberdayaan sumberdaya masyarakat dan meningkatkan kontribusi dari pemerintah daerah. Dengan memberikan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya yang merupakan bantuan pemerintah yang diperuntukan oleh masyarakat dengan kriteria pendapatan yang belum cukup sebagai stimulant untuk dapat mendirikan bangunan rumah dengan dilengkapi sarana prasarana dan utilitas umum yang memadai dan berkualitas (Binoyo. 2014:6). Maksud dan tujuan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya menurut Peraturan Menteri Pekerjaan

Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2016 adalah :

1. Meningkatkan prakarsa Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) untuk mendirikan bangunan serta meningkatkan tempat tinggal yang lebih baik dengan dilengkapi seperti prasarana, sarana dan utilitas.
2. Terwujudnya tempat tinggal yang layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dengan dilengkapi berbagai prasarana, sarana, dan utilitas umum sehingga mampu memberikan manfaat bagi tempat tinggal masyarakat yang terjamin kesehatannya, keamanannya, keserasiannya dan teratur serta berkelanjutan.

Dampak yang diharapkan dari Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) ialah meningkatnya kesejahteraan umum Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) setelah menerima bantuan yang dapat dilihat dari beberapa aspek kesejahteraan. Kondisi yang diharapkan adalah tingkat kesejahteraan penerima program meningkat setelah menerima bantuan. Dampak kebijakan BSPS atau RTLH dapat diukur dari keadaan fisik atau kondisi lingkungan yang disebabkan dari adanya hasil kebijakan yang ditetapkan. Dalam hal ini *output* kebijakannya adalah berdirinya bangunan tempat tinggal layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan dilengkapi seperti sarana, prasarana dan utilitas umum sehingga mampu memberikan manfaat bagi tempat tinggal masyarakat yang terjamin kesehatannya, keamanannya, keserasiannya dan teratur serta berkelanjutan.

Adanya program RTLH yang dilakukan masyarakat dapat merasakan manfaat yang membutuhkan tempat tinggal yang layak dihuni, prioritasnya adalah bagi warga masyarakat yang berpenghasilan rendah dan dirasa sangat membutuhkan dan kondisi rumah yang ditempati sudah tidak layak lagi. Permasalahan RTLH yang dimiliki oleh masyarakat miskin sangat banyak. Oleh karenanya diperlukan kepedulian dalam menangani masalah

tersebut dan harus terus ditingkatkan dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, masyarakat dan elemen lainnya. Untuk memperbaiki RTLH tersebut Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan dan Kementerian bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman mengalokasikan kegiatan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dengan pembuatan sarana dan prasarana lingkungan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang dapat diakses secara umum.

Program penanggulangan kemiskinan di Indonesia berusaha diintegrasikan mulai dari program penanggulangan kemiskinan bantuan sosial, berbasis pemberdayaan masyarakat serta berbasis pemberdayaan usaha kecil yang dijalankan oleh berbagai elemen Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Pemberian bantuan Rumah Tidak Layak Huni merupakan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya berupa stimulan bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk meningkatkan keswadayaan dalam pembangunan/ peningkatan kualitas rumah, prasarana, sasaran dan utilitas umum. Sasaran utama dari bantuan adalah rumah tangga dengan penghasilan rendah. Program bantuan RTLH diberikan dengan syarat yang harus dipenuhi oleh penerima bantuan.

Peningkatan kualitas adalah kegiatan memperbaiki rumah tidak layak huni secara swadaya, sehingga menjadi rumah layak huni. Kemudian Rumah Tidak Layak Huni merupakan rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan dan kesehatan penghuni. Kegiatan pemugaran rumah tidak layak huni bertujuan untuk mewujudkan rumah yang layak huni yang didukung dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sehingga menjadikan perumahan yang sehat, aman, serasi, dan teratur serta berkelanjutan. Suatu kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat. Upaya peningkatan

kesejahteraan masyarakat dilakukan dengan memenuhi kebutuhan dasar manusia salah satunya adalah menyediakan perumahan yang layak bagi masyarakat miskin.

Masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk membangun kehidupan yang sejahtera. Hanya saja, beberapa masyarakat yang berada dibawah rentang garis kemiskinan harus mendapatkan campur tangan dari pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan mereka. (Dawson, 2011). Kelompok tersebut merupakan kelompok yang memiliki kesejahteraan rendah dan kualitas hidup yang rendah (Sarah, 2018:5). Oleh karena itu, untuk meningkatkan kualitas hidup mereka, pemerintah membuat sebuah program bantuan sosial peningkatan perumahan tempat tinggal. Sebuah rumah dinyatakan tidak layak huni karena tidak memenuhi persyaratan hunian baik secara teknis dan non teknis (Milad & Brazier John, 2017:5-8). Bantuan rumah tidak layak huni merupakan bantuan yang diberikan untuk meningkatkan kesejahteraan kelompok penerima program, salah satu upaya yang ingin di capai adalah peningkatan kesejahteraan fungsional bagi para penerima program bantuan rumah tidak layak huni (RTLH).

Kesejahteraan Fungsional

Kesejahteraan fungsional merupakan kemampuan seseorang untuk mengoptimalkan kehidupan sehari-hari meliputi kondisi rumah saat ini dan pengaruh kondisi rumah dalam mendukung kegiatan sehari-hari, pembagian ruangan di rumah, pengaruh pembagian ruangan terhadap aktivitas sehari-hari, kondisi lantai rumah dan pengaruhnya terhadap aktivitas sehari-hari, adanya MCK dan pengaruhnya terhadap aktivitas sehari-hari, serta ventilasi dan pengaruhnya terhadap aktivitas sehari-hari. Berikut ini deskripsi hasil penelitian mengenai kesejahteraan fungsional kelompok sasaran dan kelompok kontrol. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa kesejahteraan fungsional kelompok sasaran secara umum berada pada kondisi

sejahtera dan sangat sejahtera. Masing-masing sebanyak 46 (49,5%) orang pada kelompok sasaran berada pada kondisi sejahtera dan sangat sejahtera. Sedangkan sebanyak 1 (1,1%) orang dari kelompok sasaran masuk kategori cukup sejahtera.

Untuk kelompok kontrol sebanyak 60 (64,5%) orang berada pada kategori kurang sejahtera. Kemudian disusul sebanyak 31 (33,3%) orang berada pada kategori cukup sejahtera dan sebanyak 2 (2,2%) orang pada kategori tidak sejahtera. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan fungsional yang dirasakan oleh kelompok sasaran dan kelompok kontrol berbeda. Kesejahteraan kelompok sasaran cenderung mendekati sangat sejahtera sedangkan kelompok kesejahteraan kelompok sasaran cukup rendah yakni pada rentang kurang sejahtera. Berdasarkan hasil wawancara dari penelitian yang dilakukan dengan salah satu penerima manfaat menyatakan bahwa bantuan RTLH sangat dirasakan dan berdampak terhadap kondisi kehidupan secara fisik dan sosial. Untuk lebih jelasnya mengenai kesejahteraan fungsional dari responden dapat dilihat pada masing-masing item pertanyaan penyusun indikator kesejahteraan fungsional yang terdiri dari:

1. Kondisi rumah

Kondisi rumah dapat digunakan sebagai tolak ukur untuk melihat kesejahteraan seseorang. Kondisi rumah yang baik dan terawat mengindikasikan orang-orang yang berada di dalam rumah tersebut memiliki tingkat kesejahteraan yang lebih baik dibandingkan dengan kondisi rumah yang tidak baik dan tidak terawat. Berikut ini hasil penelitian mengenai kondisi rumah pada kelompok sasaran dan kelompok kontrol.

Tabel . Kondisi Rumah Responden

Kondisi rumah	Kelompok sasaran	Kelompok kontrol
Sangat Baik	19 (20.4%)	20 (21.5%)
Baik	67 (72%)	36 (38.7%)
Cukup baik	7 (7.5%)	36 (38.7%)
Tidak baik	-	1 (1.1%)
Sangat tidak baik	-	-
Total	93 (100%)	93 (100%)

Sumber: data primer diolah, 2021

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa kondisi rumah dari kelompok sasaran lebih baik dibandingkan dengan kondisi rumah kelompok kontrol. Hal ini dibuktikan dengan 86 (92,4%) orang kelompok sasaran kondisi rumahnya baik sedangkan untuk kelompok kontrol yang kondisi rumahnya baik hanya 56 (59%) orang. Berdasarkan hasil penelitian kelompok sasaran dan kelompok kontrol dapat disimpulkan bahwa kondisi rumah kelompok sasaran lebih baik dibandingkan dengan kondisi rumah kelompok kontrol. Hal ini berarti program bantuan RTLH berdampak terhadap peningkatan kualitas hidup penerima manfaat.

2. Pengaruh kondisi rumah terhadap kegiatan sehari-hari

Kondisi rumah berpengaruh terhadap kegiatan sehari-hari anggota keluarga secara optimal. Kondisi rumah yang baik akan memberikan memudahkan masing-masing anggota keluarga untuk menjalankan perannya masing-masing tanpa terganggu dengan kondisi rumah. Hasil penelitian berikut ini menunjukkan bagaimana kondisi rumah berpengaruh terhadap anggota keluarga dalam menjalankan perannya masing-masing secara optimal.

Tabel 25. Pengaruh Kondisi Rumah Terhadap Kegiatan Sehari – hari

Pengaruh kondisi rumah terhadap kegiatan sehari-hari	Kelompok sasaran	Kelompok kontrol
Selalu	38 (40.9%)	-
Sering	54 (58.1%)	-
Kadang-kadang	1 (1.1%)	45 (48.4%)
Pernah	-	29 (31.2%)
Tidak pernah	-	19 (20.4%)
Total	93 (100%)	93 (100%)

Sumber: data primer diolah, 2021

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa secara umum kelompok sasaran lebih menganggap bahwa kondisi rumah saat ini akan sering dan selalu mendukungnya dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari secara optimal dibuktikan oleh 92 (99%) orang dari keseluruhan kelompok sasaran dibandingkan dengan kelompok kontrol yang hanya kadang – kadang menganggap kondisi rumahnya saat ini mendukung kegiatannya sehari-hari sebanyak 45 responden (48,4%). Salah satu responden kelompok sasaran TM (40 tahun) menyatakan “Rumah saya sudah lebih baik bu dari sebelumnya, jadi mau mengerjakan kerjaan rumah lebih enak bu, ndak berantakan, jadi rapi, mau nyetrika, mau nyuci, mau masak pokoknya dah enak lah bu” Berdasarkan jawaban dari kelompok sasaran dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh kondisi rumah terhadap mendukung kegiatannya sehari-hari sedangkan menurut jawaban dari kelompok sasaran kondisi rumah tidak begitu mempengaruhi kegiatannya. Hal ini berarti program bantuan RTLH berdampak terhadap peningkatan kualitas hidup penerima manfaat.

3. Pembagian ruangan di rumah

Pembagian ruangan di rumah mencerminkan pembuatan batas yang jelas kegiatan di rumah dilaksanakan. Pembagian ruangan di rumah disesuaikan dengan fungsi dan kegunaan masing-masing ruangan. Dengan pembagian ruangan yang sesuai

dengan peruntukan kegiatan maka orang-orang yang akan menjalankan kegiatan tertentu dapat memanfaatkan secara optimal. Berikut ini hasil penelitian terkait pembagian ruangan bagi penerima program RTLH dan kelompok kontrol.

Tabel 26. Pembagian Ruangan di Rumah

Pembagian ruangan di rumah	Kelompok sasaran	Kelompok kontrol
Lebih dari lima ruangan	20 (21.5%)	-
Empat-Lima ruangan	66 (71 %)	-
Tiga ruangan	6 (6.5%)	41 (44.1%)
Satu-dua ruangan	1 (1.1%)	41 (44.1%)
Tidak ada ruangan	-	11 (11.8%)
Total	93 (100%)	93 100%)

Sumber: data primer diolah, 2021

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pembagian ruangan dalam rumah kelompok sasaran lebih baik dibandingkan dengan kelompok kontrol. Pembagian ruangan rumah kelompok sasaran empat – lima ruangan 86 responden (92,5%) sedangkan kelompok kontrol paling banyak tiga ruangan sebesar 41 responden (44,1%). Salah satu responden kelompok sasaran DD (45 tahun) menyatakan bahwa “Rumah ini sudah dibagi – bagi menjadi 5 ruangan mba, jadi penghuni rumah saya lebih leluasa dalam melakukan aktivitas, misalnya ada ruang tamu, ruang makan, ruang tidur, dapur, dan lainnya. Sebelumnya jadi satu mbak melakukan apapun disini, ngga ada pembagian ruangan seperti sekarang”

Berdasarkan jawaban dari kelompok sasaran dan kelompok kontrol, kondisi rumah sebagian besar kelompok sasaran lebih baik dari pada kelompok kontrol, karena sudah ada pembagian ruangan, jadi ada fungsi di masing- masing ruangan. Berbeda dengan

kelompok kontrol rumahnya hanya terdiri dari satu ruangan. Hal ini berarti terdapat dampak bantuan RTLH terhadap peningkatan kualitas hidup kelompok sasaran terkait pembagian ruangan.

4. Pengaruh pembagian ruangan di rumah terhadap kegiatan sehari-hari

Pembagian ruangan di rumah berkaitan dengan kenyamanan seseorang dalam melaksanakan kegiatan tanpa adanya gangguan dari orang lain. Kesesuaian pembagian ruangan dengan fungsinya menjadikan orang merasa nyaman dalam melaksanakan kegiatan. Berikut ini kenyamanan yang dirasakan oleh responden terkait pembagian ruangan di rumah saat ini.

Tabel 27. Kenyamanan Beraktivitas Terkait Pembagian Ruangan

Kondisi lantai di rumah	Kelompok sasaran	Kelompok kontrol
Full Keramik	15 (16.1%)	-
Sebagian besar keramik	17 (18.3%)	1 (1.1%)
Sebagian besar plester	57 (61.3%)	19 (20.4%)
Tanah sebagian plester	4 (4.3%)	39 (41.9%)
Tanah semua	-	34 (36.6%)
Total	93 (100%)	93 (100%)

Kenyamanan beraktivitas terkait pembagian ruangan	Kelompok sasaran	Kelompok kontrol
Selalu	34 (36.6%)	-
Sering	52 (55.9%)	7 (7.5%)
Kadang-kadang	7 (7.5%)	39 (41.9%)
Pernah	-	31 (33.3%)
Tidak pernah	-	16 (17.2%)
Total	93 (100%)	93 (100%)

Sumber: data primer diolah, 2021

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa sebagian besar kelompok sasaran lebih merasa nyaman terkait

pembagian ruangan dibandingkan dengan kondisi kelompok kontrol. Hal ini dibuktikan dengan 86 responden (92,5%) kelompok sasaran lebih merasa nyaman sedangkan kelompok kontrol hanya kadang kadang merasa nyaman sebesar 39 responden (41,9%). Salah satu responden kelompok sasaran LF (42 tahun) menyatakan “ Jelas lebih nyaman mbak, kalo ruangan dibagi sesuai fungsinya, jadi ada bedanya antara ruang buat makan dan tidur mbak, buat menerima tamu juga lebih sopan” Berdasarkan jawaban dari kelompok sasaran dan kelompok kontrol, dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh pembagian ruangan yang dirasakan kelompok sasaran terhadap kelancaran melakukan aktivitasnya sehari-hari, sedangkan kelompok kontrol merasa tidak nyaman terkait dengan ruangan yang dilakukan dalam aktivitasnya, karena rumahnya tidak dibagi menjadi beberapa ruangan. Hal ini berarti kondisi kelompok sasaran lebih baik jika dibandingkan dengan kelompok kontrol.

5. Kondisi lantai rumah

Kondisi lantai rumah becek dan berair menyebabkan orang-orang yang beraktivitas terganggu. Kegiatan di rumah tidak akan bisa berjalan optimal karena kondisi tersebut. Berikut ini kondisi lantai rumah yang dimiliki oleh responden.

Tabel 28. Kondisi Lantai di Rumah
Sumber: data primer diolah, 2021

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa kondisi rumah kelompok sasaran lebih baik dibandingkan dengan kondisi rumah kelompok kontrol. Kelompok sasaran yang rumahnya dikeramik sebanyak 32 reponden (34,4%) sedangkan kelompok kontrol hanya 1 responden yang dikeramik (1,1%). Salah satu responden kelompok sasaran DD (45 tahun) menyatakan bahwa “ Setelah direhab, Alhamdulillah bu rumahnya jadi dikeramik, kalau dulu masih tanah, kalau rumahnya bocor, bawah jadi becek, sekarang dengan adanya bantuan rumah tidak layak huni jadi lebih baik dan sangat merasakan manfaatnya.”

Berdasarkan jawaban dari kelompok sasaran dan kelompok kontrol dapat disimpulkan bahwa kondisi lantai kelompok sasaran paling banyak sebagian besar plester, namun sudah banyak yang dikeramik, sedangkan untuk kelompok kontrol sebagian besar tanah. Hal ini berarti terdapat perbedaan signifikan antara kelompok sasaran dan kelompok kontrol, sehingga program RTLH memiliki dampak terhadap peningkatan kualitas hidup penerima manfaat

6. Pengaruh kondisi lantai rumah Kegiatan sehari-hari

Kondisi lantai yang sudah keras dan tidak becek menyebabkan anggota keluarga merasa nyaman melaksanakan kegiatan sehari-hari. Apalagi bagi keluarga yang memiliki anak kecil, kondisi lantai akan sangat memberikan kenyamanan bagi orang tua untuk membiarkan anaknya bermain di lantai. Hasil penelitian berikut ini menunjukkan bagaimana tingkat kenyamanan responden dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari dengan kondisi lantai yang ada saat ini.

Tabel 29. Kenyamanan Beraktivitas Terkait Kondisi Lantai

Kenyamanan beraktivitas terkait kondisi lantai	Kelompok sasaran	Kelompok kontrol
Selalu	37 (39.8%)	-
Sering	46 (49.5%)	7 (7.5%)
Kadang-kadang	10 (10.8%)	56 (30.1%)
Pernah	-	31 (33.3%)
Tidak pernah	-	9 (9.7%)
Total	93 (100%)	93 (100%)

Sumber: data primer diolah, 2021

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa kelompok sasaran lebih merasa nyaman untuk beraktivitas dengan kondisi lantai saat ini dibuktikan oleh jawaban dari 83 (89.3%) orang dibandingkan dengan kelompok kontrol yang kadang – kadang merasa nyaman dengan kondisi lantai saat ini sebesar 56 (30,1%) orang. Salah satu responden kelompok sasaran RS (47 tahun)

menyatakan bahwa, “ Setelah dikeramik saya jadi lebih nyaman mbak dirumah, ngga seperti dulu lantainya tanah ngga bisa buat duduk, harus ada tikarnya mbak kalau mau duduk dibawah, kalau musim hujan rasanya dingin sekali “. Berdasarkan jawaban dari kelompok sasaran dan kelompok kontrol dapat disimpulkan bahwa kondisi lantai kelompok sasaran yang plester dan keramik memberikan pengaruh kenyamanan dalam melakukan kegiatan sehari – hari. Apabila dibandingkan dengan kelompok sasaran yang hanya kadang – kadang memberikan pengaruh kenyamanan dalam melakukan aktivitasnya. Hal ini berarti bantuan program RTLH memberikan dampak terhadap peningkatan kualitas hidup penerima manfaat.

7. Kondisi Dan Penggunaan WC/MCK

Indikator Perilaku Hidup Bersih Sehat menurut Pemerintah Provinsi Jawa Tengah salah satunya adalah penghuni rumahnya melakukan MCK di WC. Ketika para penghuni rumah sudah melakukan MCK di dalam WC dan tersedianya WC di dalam atau di luar rumah berarti keluarga tersebut sudah masuk indikator keluarga yang berperilaku hidup bersih sehat. Kondisi WC/MCK yang dimiliki oleh keluarga berkaitan dengan kesehatan keluarga tersebut. Keluarga yang membuang kotoran secara sembarangan karena tidak memiliki WC/ MCK akan lebih mudah terserang penyakit seperti disentri, muntaber, dan penyakit yang disebabkan oleh kurang bersihnya lingkungan. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa WC/MCK yang dimiliki oleh responden adalah sebagai berikut.

Tabel 30. Kondisi WC/ MCK

Kondisi WC/MCK	Kelompok sasaran	Kelompok kontrol
Ada permanen di dalam dan di luar rumah	26 (28%)	-
Ada di luar rumah	58 (62.4%)	20 (21.5%)

Ada kakus	4 (4.3%)	56 (60.2%)
Ada kakus tapi rusak	-	15 (16.1%)
Tidak ada/ MCK di sungai	5 (5.4%)	2 (2.2%)
Total	93 (100%)	93 (100%)

Sumber: data primer diolah, 2021

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa kondisi WC kelompok sasaran lebih baik dibandingkan dengan kondisi WC kelompok kontrol. Hal ini dibuktikan dengan 84 (90,4%) orang kelompok sasaran mempunyai WC di dalam dan luar rumah sedangkan kelompok kontrol hanya 20 (21,5%) orang yang mempunyai WC di luar rumah. Salah satu responden kelompok sasaran PR (51 tahun) menyatakan bahwa “Saya punya WC dua, diluar dan didalam rumah, anak saya kan 3 kalau mau sekolah jadi ngga rebutan kalau mau mandi” kalau mau mandi ya numpang di rumah orang tua saya atau kakak saya, nanti kalau mau buang air besar numpang di masjid, kalau ngga di sungai deket sini, mau buat sendiri ngga ada biaya. Berdasarkan jawaban dari kelompok sasaran dan kelompok kontrol dapat disimpulkan bahwa kelompok sasaran lebih baik dari pada kelompok kontrol, karena kelompok sasaran kebanyakan sudah memiliki WC sendiri, sedangkan kelompok kontrol tidak. Hal ini berarti program RTLH memiliki dampak dalam peningkatan kualitas hidup penerima manfaat dalam hal peningkatan perilaku hidup sehat.

8. Pengaruh kondisi WC/MCK terhadap kegiatan sehari-hari

Kondisi WC/MCK berpengaruh terhadap kenyamanan seseorang dalam melakukan aktivitasnya sehari-hari. Kondisi yang baik akan berpengaruh terhadap orang-orang yang beraktivitas disana. Berikut ini kenyamanan yang dirasakan oleh responden terkait kondisi WC/MCK yang dimilikinya.

Tabel 31. Kenyamanan Beraktivitas Terkait Kondisi WC/ MCK

Kenyamanan beraktivitas terkait kondisi WC	Kelompok sasaran	Kelompok kontrol
Selalu	42 (45.2%)	1 (1.1%)
Sering	47 (50.5%)	5 (5.4%)
Kadang-kadang	2 (2.2%)	51 (54.8%)
Pernah	-	27 (29%)
Tidak pernah	2 (2.2%)	9 (9.7%)
Total	93 (100%)	93 (100%)

Sumber: data primer diolah, 2021

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa sebagian besar kelompok sasaran lebih merasa nyaman dengan kondisi WC/MCK yang dimiliki saat ini yaitu sebanyak 89 (95,7%) orang sedangkan 51 (54,8%) hanya kadang – kadang merasa nyaman dengan kondisi WC/ MCK saat ini. Salah satu responden kelompok sasaran PR (51 tahun) menyatakan bahwa, “ dengan adanya bantuan rehap rumah saya bisa jadi membuat MCK untuk keluarga jadi ngga harus pinjem tetangga kalau untuk keperluan mandi, mencuci, dan buang air”. Berdasarkan jawaban dari kelompok sasaran dan kelompok kontrol dapat disimpulkan bahwa kelompok kontrol merasa lebih nyaman dibandingkan dengan kelompok kontrol, karena kelompok sasaran memiliki WC sendiri sedangkan kelompok kontrol tidak. Hal ini berarti bantuan program RTLH memberikan dampak terhadap peningkatan kualitas hidup penerima manfaat.

9. Kondisi ventilasi

Kondisi ventilasi dan jendela di rumah berkaitan dengan sirkulasi udara yang masuk. Udara yang masuk ke dalam rumah menjadikan rumah dalam kondisi segar. Berbeda dengan rumah yang tidak memiliki

jendela atau ventilasi, udara yang ada di dalam rumah terasa pengap. Berikut ini kondisi ventilasi atau jendela yang dimiliki oleh responden sebagai berikut.

Tabel 32. Kondisi Ventilasi

Kondisi ventilasi	Kelompok sasaran	Kelompok kontrol
Ada di setiap ruangan	49 (52.7%)	1 (1.1%)
Ada lebih dari 4 ventilasi	17 (18.3%)	8 (8.6%)
Ada 2-4 ventilasi	27 (29%)	46 (49.5%)
Ada 1 ventilasi	-	32 (34.4%)
Tidak ada ventilasi	-	6 (6.5%)
Total	93 (100%)	93 (100%)

Sumber: data primer diolah, 2021

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa kondisi ventilasi kelompok sasaran lebih baik dibandingkan dengan kondisi ventilasi kelompok kontrol. Kelompok sasaran yang memiliki ventilasi lebih dari 4 ventilasi yaitu 66 (71%) orang sedangkan kelompok sasaran hanya memiliki 2 – 4 ventilasi yaitu 46 (49,5%) orang. Salah satu responden kelompok sasaran DD (45 tahun) menyatakan bahwa “Rumah saya sudah dibagi menjadi 5 ruangan mbak, semua ruangan ada jendelanya, tujuan saya ya biar ada pergantian udara mbak, pagi hari dibuka udaranya langsung masuk. Saya pernah ikut sosialisasi PHBS di balai desa mbak, kata pak mantri kalau ruangan yang bagus itu yang masing-masing ruangan ada jendelanya, jadi saya ikut kata pak mantri”. Berdasarkan jawaban dari kelompok sasaran dan kelompok kontrol dapat disimpulkan bahwa kondisi rumah kelompok sasaran lebih baik dan sehat jika dibandingkan dengan kondisi rumah kelompok kontrol, hal ini dikarenakan kelompok kontrol kebanyakan ventilasi di masing – masing ruangan dirumahnya sedangkan kelompok kontrol tidak. Hal ini berarti program bantuan RTLH memberikan dampak

terhadap peningkatan kualitas hidup penerima manfaat.

10. Pengaruh kondisi ventilasi terhadap kegiatan sehari-hari

Kondisi ventilasi berpengaruh terhadap kegiatan sehari-hari anggota keluarga. Hal ini disebabkan karena fungsi ventilasi rumah menjadikan sebuah rumah menjadi hunian yang sehat atau tidak. Rumah yang memiliki ventilasi cukup akan menjadikan udara yang selalu segar, begitupula sebaliknya. Kenyamanan responden terkait ventilasi yang dimiliki adalah sebagai berikut

Tabel 33. Kenyamanan Beraktivitas Terkait

Kenyamanan beraktivitas terkait ventilasi	Kelompok sasaran	Kelompok kontrol
Selalu	50 (53.8%)	2 (2.2%)
Sering	41 (44.1%)	7 (7.5%)
Kadang-kadang	2 (2.2%)	42 (45.2%)
Pernah	-	33 (35.5%)
Tidak pernah	-	9 (9.7%)
Total	93 (100%)	93 (100%)

Sumber: data primer diolah, 2021

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa kelompok sasaran lebih merasa nyaman melaksanakan aktivitas sehari-hari dengan kondisi ventilasi yang dimiliki saat ini sebanyak 91 (97,9 %) orang dibandingkan dengan kelompok kontrol 42 (45,2%) orang yang hanya kadang – kadang merasa nyaman dengan kondisi ventilasi yang dimiliki saat ini. Salah satu responden kelompok sasaran SK (45 tahun) menyatakan bahwa, : “Rumah ini satu ruangan saja sih mbak, jadi sumpek, jendelanya juga satu, jadi kurang baik, tapi dengan adanya bantuan rehap rumah jadi bisa buat tambahan baiaya beli jendela “ Berdasarkan jawaban dari kelompok sasaran dan kelompok kontrol dapat disimpulkan bahwa kondisi kelompok sasaran merasa lebih nyaman dibandingkan dengan kelompok kontrol, karena setiap ruangan diruangan mereka memiliki jendela,

sehingga ada sirkulasi udara agar bisa mendukung bagi kesehatan keluarga.

KESIMPULAN

Aplikasi e-Order sebagai marketplace akan Program bantuan rumah tidak layak huni (RTLH) yang di laksanakan di Kabupaten Banyumas saat ini memiliki dampak yang cukup baik dilihat dari aspek Kesejahteraan Fungsional yang meliputi kriteria penilaian, Pengaruh kondisi rumah terhadap kegiatan sehari-hari menunjukkan dampak yang signifikan. Kriteria pengaruh kondisi rumah terhadap kegiatan sehari-hari bagi keluarga penerima manfaat juga berdampak signifikan. Kriteria pembagian ruangan di rumah dengan aktivitas keluarga penerima program memiliki dampak yang signifikan. Kriteria penggunaan MCK memberikan dampak yang signifikan terhadap kelompok sasaran. Kriteria pengaruh kondisi ventilasi terhadap kegiatan sehari-hari juga berdampak signifikan bagi kelompok sasaran. Dalam pelaksanaan program bantuan ini kondisi kelompok sasaran lebih sejahtera jika dibandingkan dengan kondisi kelompok kontrol. Dalam proses kebijakan publik, evaluasi kebijakan dapat dipandang sebagai bagian akhir dari proses kebijakan publik, dapat juga dikatakan tidak. Setelah tahap evaluasi kebijakan ada tahap terminasi kebijakan atau perubahan kebijakan artinya dimana kebijakan tersebut akan diteruskan atau tidak. Apabila kebijakan tersebut menghasilkan dampak positif yang signifikan terhadap kondisi kelompok sasaran dalam hal ini dapat mengurangi kemiskinan, maka kebijakan tersebut layak untuk diteruskan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Huma, Urooj Islam, & Shabnan Parven.2017." *Impact of Green Human Resource Management Practices on Job Seekers' Attraction*", *Journal of Resources Development and Management*, Vol 38, No.1, Pp 26 -32
- Aiafi, Patoae Roberts, 2017." *The Nature of Public Policy Processes in The Pacific Island*", *Asia & The Pacific Public Studies*.Vol 4,No.3,Pp 451-466
- Augustine, E Bassey, Lazarus B, Abonor & Joy AE. 2017. "The Impact of Female Genital Mutilation (FGM) on Hemorrhage During Child Birth Among Rural Women of Cross River State", *Information and Knowledge Management*, Vol 7, No.11, Pp 1 – 13
- Babatunde, Binoyo.2014."Effect of Poverty Reduction Programmes on Economics Development Evidence from Nigeria." *Arabian Journal of Bussines Nad Management Review (OMAN Chapter)*, Vol 4, No 1, Pp 26 -37
- Baghebo, Michael & Nathan, Emmanuel. 2015." *The Impact of Poverty Alleviation Programmes on Economic Growth in Nigeria 1981 – 2013*". *International Journal of Humanities and Social Science*, Vol. 5, No 10 Pp 177 – 188
- Barrientos, Armando & Pellissery, Sonny .2011. "Delivering effective social assistance: Does politics matter?". *International Journal of Social Welfare*. Vol 1, No.9, Pp 3 -28
- Bredenoord & J.Archit Eng.2016. "Sustainable Housing & Building Materials for Low Income Households". *Journal of Architectural Engineering Technology*, Vol 5, No.1, Pp 1-9
- Creswell, R. 2014. *Research Design, Qualitative, Quantitative, and Mixed Method Approaches*, "Sage Journal"
- Dawson, A. (2011). "A case study of impact measurement in a third sector umbrella organization. *International Journal of Productivity and Performance Management*, 59(6), 519–533.
- Derrick and White, P. 2017. *Comparing two samples from an individual Likert question*. "International Journal of Mathematics and Statistics" 18 (3).
- Declan.2018. *Reliability and Validity of the International Physical Activity Questionnaire Compared to Calibrated Accelerometer cut-off points in the Quantifications of Sedentary Behaviour and Physical Activity in Older Adults*." *Journal PONE*", Vol 1 No 9

- Etzioni, Amitai. 2010. "Life: The Most Basic Right". *Journal of Human Rights* Vol 9, No.1
- Gold, Sarah.2018." *Housing Assistance and Residential Stability Among Low Income Children* ". *The University of Chicago Press Journal*, Vol92, No.2
- Karimi, Milad & Brazier, John. 2017." *Health, Health-Related Quality of Life, and Quality of Life: What is the Difference?*".*The Journal of Applied Laboratory Medicine*.Pp 1-9
- Jeelani M, Iqbal, Faizan Danish, and Mansha Gul. 2018.*Review on the Recent Development on the Cluster Sampling, "Biostatistics and Biometric Open Access Journal", Volume 5 Issue 5*
- Joshi, Ankur Saket Kale, Satish Chandel and D. K. Pal1. Likert Scale: Explored and Explained "*British . Journal of Applied Science & Technology*", Vol 7 No 3 Pp: 396-403
- Kalimba, Edmond, Jaya Sukhla &Mbabazi Mbabazize. 2016 *Effect of Credit Management System on Financial Performance of Development Bank in Rwanda: Case Study of Development Bank of Rwanda, " The International Journal Of Business & Management", Vol 4 No 4*
- Korankye, Alex Adde. 2014."Causes of Poverty in Africa: A Review of Literature." *American International Journal of Social Science*, Vol. 3, No.7, Pp 147 - 153
- Kwong, Yan Wai. 2015."A Review of the Impacts of Agenda-sett." *Journal of Communication and Education.*" Vol 2, No.2
- Lang, Jing & Yin, Runsheng. 2017." *Research Trends: Policy Impact Evaluation, Future Contributions From Economics*", *Journal Policy and Economics*, Vol 8, No.2, Pp 142-145
- Lemieux, Thomas.2017."Ineffective Effect of Social Assistance: A Regression Discontinuity Approach." *Journal Of Econometric*
- Leung, et al.2015." *Support for Policies to Improve the Nutritional Impact of the Supplemental Nutrition Assistance Program in California*". *American Journal of Public Health*, Vol 105, No.8
- Leung, Lawrence.2015.*Validity, Reliability, and Generalizability in Qualitative Research. " Research and audit Journal ", Vol 4 Issue 3*
- Liou, Chiun He.2017." *Child Poverty and its Impacts on Social Exclusion in Taiwan.*" *Journal of Asian Public Policy*, Vol 10, No.12
- Molina et, al.2013." *Impact of a home-based social welfare program on care for palliative patients in the Basque Country (SAIATU Program)*" *Journal of Social Welfare*, Vol 12, No.3
- Musa, Umar Farouk.2016." *Politic of Poverty Alleviation Program in Nigeria: Challenges and prospect*".*Journal of Education and Social Sciences*, Vol 4, No.1 June 2016
- Mustapha, Rafiu A.2017." *Impact of poverty reduction program of the Kwara state government of Nigeria on the beneficiaries*". *International Journal of Economics, Commerce and Management United Kingdom*, Vol 5, No.3, March 2017, Pp 247 – 262
- Marmara & Mahbub.2018. *A Comparative Study on Environmental Impact Assessment of Industrial Project in Malaysia.*" *Journal of Earth and Environmental Science*, Vol 3 No 1
- Munshi, Jamal.2014. *A Method For Constructing Likert Scale.* " *SSRN Economics Journal*", Vol 1 No 23
- Naderi, Samane & Akrami, Azam. 2018. *EFL Learners' Reading Comprehension Development through MALL: Telegram Groups in Focus,*" *International Journal of Instruction*", Vol 1 No 2 Pp 339 -350
- Normaliza, A.M & Kamarulazizi Ibrahim.2017. "*Poverty Reduction for Sustainable Development: Malaysia's Evidence-Based Solutions*". *Global Journal of Social Sciences Studies*, Vol. 3, No. 1, Pp 29 – 42.
- Nwagboso, Chris.2012. "*Public Policy and the Challenges of Policy Evaluation in the Third World* ". *British Journal of Humanities and Social Sciences* Vol 5, No.1, Pp 59-76
- Okonkwo,Osmond and Alvan Ikoku. 2015. "*Critical Review of Poverty Reduction Programme in Nigeria: Evidence from South-East Zone*". *Journal of Economics and Finance*, Vol 6, No.6., Pp 32-43
- Sommers, Benjamin. 2018. *Health Insurance Coverage and Health What the Recent*

Evidence Tell Us” The New England Journal of Medicine, Vol 20

- Theofilau, Paraskevi. 2013. “*Quality of Life: Definition and Measurement. “ Europe's Journal of Psychology, Vol 9 Issue 1, Pp 150 – 163.*”
- Wilson, Ron & Brend De Mast.2013.” *Housing Programs, Assisted Populations, and Crime: Guest Editors’ Introduction”.* *Cityscape: A Journal of Policy Development and Research, Vol 15, No. 3*
- Yanfika, Helfi, Siti Amanah, Anna Fatchiya, & Pang S. Asngari.2018.*Worker Performance from Perspective of Profit, Quality and Work Accuracy in Traditional Fishery Business in Lampung Province.” International Journal of Social Science and Economic Research”, Volume:03, Issue:02*
- Yu, Stan & McLaughlin, Darrell Arthur.2013.” *Program Evaluation and Impact Assessment in International Non Governmental organizations (INGOs): Exploring Rules, Benefits, and Challenges”.* *Canadian Journal of Nonprofit and Social Economy Research, Vol 4, No.2, Pp 23-36*

Sumber Lain:

- Peraturan Presiden Republik Indonesia No.166 Tahun 2014 Tentang Program Penanggulangan Kemiskinan
- Instruksi Presiden No.7 Tahun 2014 Tentang Pemberian Bantuan Sosial
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No.13 Tahun 2016 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya